



## PERAN KEPALA DUSUN PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEWILAYAHAN DI DESA REJOSARI KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO

Anissa Fauziyah<sup>1</sup>, Triana Rejekiningsih<sup>2</sup>

Universitas Sebelas Maret

Anissafauziyah44@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tantangan kepala dusun perempuan dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan di Desa Rejosari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala dusun berperan dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan, namun masih menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan dalam komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan partisipatif serta pendekatan yang lebih kolaboratif agar hubungan antar warga lebih harmonis.

**Kata Kunci :** Kepala Dusun, Kepemimpinan Perempuan, Pemerintahan Desa, Gender, Partisipasi Masyarakat

### ABSTRACT

*This research aims to understand the role and challenges of female hamlet heads in carrying out territorial administrative duties in Rejosari Village, Polokarto Subdistrict, Sukoharjo Regency. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that female hamlet heads play a role in the implementation of territorial tasks but still face several challenges in carrying out their duties. The proposed solution is to strengthen more open and participatory two-way communication, as well as to adopt a more collaborative approach to foster more harmonious relationships among residents.*

**Keywords:** Hamlet Head, Female Leadership, Village Governance, Gender, Community Participation

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan di Indonesia yang berperan langsung dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala dusun, sebagai perangkat desa, memiliki posisi strategis dalam menjalankan tugas kewilayahan, mulai dari koordinasi administrasi hingga menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat desa.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, perempuan mulai dilibatkan dalam kepemimpinan desa, termasuk sebagai kepala dusun. Namun, keterlibatan perempuan di posisi ini masih menghadapi tantangan budaya, stereotip, dan keterbatasan dukungan struktural. Meskipun secara normatif hak dan peluang telah dibuka, dalam praktiknya perempuan masih kerap dipandang kurang layak memimpin dibandingkan laki-laki.

Desa Rejosari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, menjadi salah satu contoh di mana perempuan dipercaya menjabat sebagai kepala dusun. Namun, belum banyak kajian akademik yang mengulas peran kepala dusun perempuan dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan di desa ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana perempuan menjalankan fungsi kepemimpinan kewilayahan, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap pelayanan publik dan pembangunan desa.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Tentang Peran

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial (Kozier dalam Ismaningtyas, 2016). Soekanto (dalam Ismaningtyas, 2016) menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status sosial, yang menentukan tindakan individu terhadap

masyarakat serta peluang yang diberikan kepadanya. Namun, dalam menjalankan perannya, seseorang dapat mengalami konflik peran (*role conflict*) ketika terdapat benturan antarperan, atau tekanan peran (*role strain*) ketika harapan dalam satu peran saling bertentangan (Hendropuspito dalam Banowati, 2015). Thoha (2005) menambahkan bahwa keberhasilan seseorang dalam menjalankan perannya dipengaruhi oleh karakter pribadi, pemahaman terhadap harapan sosial, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan desa, peran kepala dusun—terutama perempuan—tidak hanya mencerminkan tanggung jawab struktural, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

### B. Kajian Tentang Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan paling dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai lokal (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, pembinaan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Rasyid (2020), desa menjadi ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam praktiknya, pemerintahan desa dituntut untuk transparan, partisipatif, dan akuntabel, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti kapasitas sumber daya manusia dan hambatan budaya yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi yang inklusif.

### C. Kajian Tentang Kepala Dusun

Kepala dusun adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah dusun. Menurut *Permendagri*

*Nomor 84 Tahun 2015*, kepala dusun memiliki tanggung jawab melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, koordinasi pembangunan, dan pengelolaan administrasi di wilayahnya. Kepala dusun menjadi penghubung antara pemerintah desa dan warga dusun, sehingga perannya sangat strategis dalam menjamin kelancaran komunikasi dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal (Sutrisno, 2020). Peran kepala dusun menuntut kepemimpinan yang komunikatif, adaptif, serta mampu menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat dengan baik agar tercipta pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif.

#### **D. Kajian Tentang Tugas Kewilayah**

Tugas kewilayah merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dijalankan oleh perangkat desa, khususnya kepala dusun, dalam rangka memastikan kelancaran administrasi, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayah dusun. Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kepala dusun bertugas melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, pendataan kependudukan, pengawasan kegiatan pembangunan, serta menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. Peran ini penting karena kepala dusun menjadi perpanjangan tangan kepala desa dalam menjangkau masyarakat secara langsung dan memastikan implementasi kebijakan pemerintah desa berjalan efektif (Kurniasih, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan tugas kewilayah sangat bergantung pada kemampuan kepala dusun dalam menjalin komunikasi, memahami kebutuhan lokal, dan membangun partisipasi warga.

#### **E. Kajian Tentang Kepemimpinan Perempuan**

Kepemimpinan perempuan merupakan bentuk kepemimpinan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, pengalaman, dan perspektif gender yang unik, yang sering

kali menekankan pendekatan partisipatif, empatik, dan kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Menurut Fakih (2003), kepemimpinan perempuan tidak hanya soal posisi formal, tetapi juga bagian dari upaya transformasi sosial untuk menghapus ketimpangan gender dalam berbagai ruang, termasuk politik dan pemerintahan. Sementara itu, menurut Barker (2004), kepemimpinan perempuan juga merupakan strategi politik untuk melakukan intervensi terhadap sistem yang masih dominan patriarkal. Dalam konteks lokal seperti pemerintahan desa, kepemimpinan perempuan sering menghadapi tantangan budaya dan struktural, namun di sisi lain juga membawa pendekatan yang lebih peka terhadap isu-isu sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam peran kepala dusun perempuan dalam penyelenggaraan tugas kewilayah. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rejosari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, karena desa ini memiliki kepala dusun perempuan yang aktif dalam pemerintahan. Subjek penelitian terdiri dari kepala dusun perempuan, kepala desa, perangkat desa lainnya, serta tokoh masyarakat dan warga setempat yang relevan dengan konteks penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, dibantu dengan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah-langkah penelitian meliputi tahap observasi awal, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan: reduksi data,

penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## **HASIL**

Hasil penelitian ini disajikan dalam beberapa sub-bagian yang mencakup deskripsi tentang peran kepala dusun perempuan dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan dan mengetahui tantangan yang dihadapi kepala dusun perempuan di Desa Rejosari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan Kepala Dusun dan warga di Desa Rejosari.

1. Peran Kepala Dusun Perempuan dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan Penelitian menunjukkan bahwa kepala dusun perempuan di Desa Rejosari mampu menjalankan berbagai peran strategis dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan dengan baik, meliputi:

a. Koordinasi dan administrasi dusun  
Kepala dusun lebih berfokus pada koordinasi internal dan penyampaian informasi kepada warga, namun tidak terlibat langsung dalam pengurusan administrasi seperti surat menyurat, karena hal tersebut umumnya ditangani langsung oleh warga di kantor desa.

b. Pelaksanaan program pemerintahan  
Kepala dusun aktif mengawal program pembangunan dan kegiatan pemerintah desa di wilayah dusun

c. Pelayanan warga dan mediasi konflik  
Kepala dusun perempuan dinilai kurang membaur oleh sebagian warga. Sifatnya yang tegas dan cenderung kaku membuat sebagian warga merasa enggan atau canggung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, karena mereka menilai bahwa pendapat yang disampaikan sering tidak mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh kepala dusun.

d. Pelibatan warga dalam musyawarah dan perencanaan.

Partisipasi masyarakat tampak belum maksimal, karena warga merasa prosesnya bersifat formalitas dan keputusan utama tetap berasal dari kepala dusun

e. Pelaksanaan tugas penarikan pajak bumi dan bangunan

Kepala dusun menjalankan tugasnya dengan baik, dengan penyampaian informasi dan pengumpulan yang berjalan sesuai ketentuan.

2. Tantangan yang dihadapi Kepala Dusun dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan

Dalam menjalankan tugas kewilayahan, kepala dusun perempuan di Desa Rejosari menghadapi berbagai tantangan yang bersifat sosial, kultural, dan struktural. Pertama, masih kuatnya pandangan gender dan stereotip terhadap perempuan menjadi hambatan utama. Sebagian warga masih menganggap bahwa kepemimpinan adalah domain laki-laki, sehingga kehadiran kepala dusun perempuan belum sepenuhnya diterima secara setara. Sikap tegas dan gaya kepemimpinan kepala dusun justru sering ditanggapi sebagai sikap otoriter, bukan ketegasan dalam pengambilan keputusan.

Kedua, terdapat hambatan partisipasi dan komunikasi dari warga. Kepala dusun perempuan dinilai kurang membaur dengan masyarakat, sehingga banyak warga merasa segan atau enggan menyampaikan aspirasi mereka. Keputusan yang cenderung bersifat top-down menyebabkan sebagian warga merasa aspirasi mereka kurang diperhatikan, sehingga partisipasi dalam forum musyawarah menjadi rendah.

Ketiga, kepala dusun perempuan juga mengalami keterbatasan dukungan dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dukungan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat belum sepenuhnya optimal, sementara di sisi lain, beban sosial dan ekspektasi sebagai perempuan dalam peran domestik turut menambah tekanan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas kewilayahan, khususnya dalam membangun komunikasi yang inklusif dan partisipatif di tingkat dusun.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa peran kepala

dusun perempuan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam pemerintahan, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial dan budaya yang masih bias gender di lingkungan pedesaan.

## PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis dan menggali lebih dalam hasil penelitian mengenai peran kepala dusun perempuan dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan serta tantangan yang dihadapi di Desa Rejosari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Dengan menjelaskan berbagai aspek yang teridentifikasi, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan tantangan kepala dusun perempuan dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala dusun perempuan di Desa Rejosari memiliki peran penting dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara partisipatif. Peran yang dijalankan mencakup koordinasi administratif, pelaksanaan program pemerintahan, pelayanan warga, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, hingga pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, keterlibatan kepala dusun dalam beberapa aspek, seperti komunikasi sosial dan pembauran dengan warga, masih mengalami kendala. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa masih dihadapkan pada berbagai tantangan sosial dan budaya.

Dari segi teori peran, sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (dalam Ismaningtyas, 2016), peran merupakan aspek dinamis dari status sosial. Dalam konteks ini, kepala dusun perempuan memegang status formal dalam struktur pemerintahan desa, namun ekspektasi masyarakat terhadap peran tersebut dipengaruhi oleh konstruksi sosial tentang

gender. Perempuan pemimpin sering kali dihadapkan pada dilema antara tuntutan profesional dan harapan sosial tradisional, yang tercermin dalam anggapan bahwa pemimpin harus bersikap hangat namun tetap tegas, yang seringkali menjadi standar ganda bagi perempuan.

Lebih jauh, hasil penelitian ini menguatkan temuan Makfirah (2022) bahwa kepala dusun perempuan sering mengalami beban ganda dan kurang dukungan dari struktur desa. Hal ini juga sejalan dengan teori feminis yang menyoroti hambatan sistemik dan kultural yang dihadapi perempuan dalam mengakses posisi pengambilan keputusan. Partisipasi warga yang rendah dan komunikasi yang tidak efektif bukan semata-mata karena kelemahan dalam kepemimpinan, tetapi juga karena norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik.

Selain itu, keberadaan kepala dusun perempuan yang tegas namun kurang membaur juga menunjukkan pentingnya pendekatan kepemimpinan yang tidak hanya administratif, tetapi juga relasional. Kepemimpinan perempuan berpotensi membawa gaya kepemimpinan yang empatik dan kolaboratif, sebagaimana dikemukakan oleh Alivia et al. (2024), namun gaya ini memerlukan ruang sosial yang mendukung dan bebas dari stereotip gender.

Dengan demikian, dibutuhkan strategi pemberdayaan kepala dusun perempuan yang tidak hanya fokus pada pelatihan teknis, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial, komunikasi, dan dukungan dari lingkungan. Pemerintah desa dan masyarakat perlu membangun kesadaran kolektif bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah anomali, melainkan bagian dari proses demokratisasi dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang inklusif.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepala dusun perempuan di Desa Rejosari telah menjalankan perannya dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan yang mencakup koordinasi administratif, pelaksanaan program pemerintah, pelayanan warga, pelibatan masyarakat, dan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stereotip gender, rendahnya partisipasi warga, serta keterbatasan dukungan sosial dan struktural. Sikap kepemimpinan yang tegas namun kurang membaur dengan masyarakat menjadi hambatan dalam membangun komunikasi yang efektif dan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kepala dusun perempuan, baik dalam aspek teknis maupun sosial, serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa agar tercipta kepemimpinan lokal yang inklusif, responsif, dan berkeadilan gender.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alivia, A., Purnamasari, R., & Ramdani, R. (2024). Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Desa: Studi Gaya Kepemimpinan dan Tantangannya. Bandung: Pustaka Pemerintahan Daerah.
- Banowati, E. (2015). Sosiologi untuk Perguruan Tinggi. Surakarta: UNS Press.
- Barker, C. (2004). Cultural Studies: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fakih, M. (2003). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismaningtyas, T. (2016). Peran dan Fungsi Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Dalam Negeri. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Kurniasih, A. (2022). Manajemen Pemerintahan Desa: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makfirah. (2022). "Perempuan dalam Kepemimpinan Pemerintahan Gampong di Aceh: Antara Tantangan dan Peluang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 19(2), 194–198.
- Rasyid, M. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno, E. (2020). Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Prenada Media Group.
- Thoha, M. (2005). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Trianingsih, D., & Agustina, Y. (2024). Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Surakarta: Literasi Nusantara.